

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS NILAI-NILAI LOKAL DI KELURAHAN LAMBUANG BUKIK, KOTA PADANG

Tamrin, Didi Rahmadi, Zulfadli, Asrinaldi, Aidinil Zetra

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email: tamrinkiram@gmail.com

Abstrak

Sudah terdapat upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui proses berjenjang, seperti pelaksanaan Musrembang yang dimulai dari tingkat Kelurahan. Namun, tidak seluruh aspirasi masyarakat tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme resmi yang dijalankan dalam perencanaan pembangunan pemerintah ini, diperlukan saluran lain agar aspirasi masyarakat yang tidak bisa ditampung dalam pelaksanaan Musrembang di Kelurahan ini bisa disalurkan melalui saluran lain di luar pemerintah yang berbasis nilai-nilai lokal. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang ini berusaha untuk meningkatkan bentuk perencanaan pembangunan berbasis nilai-nilai lokal masyarakat, agar aspirasi masyarakat yang disalurkan dalam pelaksanaan Musrembang Kelurahan tidak hanya menjadi program kerja SKPD Kelurahan atau SKPD lain yang terkait dalam lembaga pemerintahan tetapi juga bisa menjadi program kerja yang bisa didanai oleh kegiatan swadaya masyarakat. Melalui penggunaan analisa kelemahan dan kekuatan (SWOT) serta metode daur pembelajaran orang dewasa serta pengalaman, maka dihasilkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan serta pengetahuan yang meningkat dalam merumuskan bentuk perencanaan partisipasi masyarakat di Kelurahan Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Kata kunci : pembangunan partisipatif, nilai loka, daur pembelajaran orang dewasa

Abstract

There has been an attempt to accommodate the aspirations of the people in development planning through a tiered process, such as the implementation of Musrembang starting from the Kelurahan level. However, not all of the aspirations of the community can be channeled through the official mechanisms implemented in this government development plan, another channel is needed so that the aspirations of the unpardonable community in the implementation of Musrembang in Kelurahan can be channeled through other channels outside the government based on local values . Community service in Lambuang Bukik urban village, Pauh subdistrict, Padang City is trying to improve the form of development planning based on local values of the community, so that the aspirations of the community that is channeled in the implementation of Musrembang Kelurahan is not only the work program of SKPD Kelurahan or other SKPD government agencies but can also be work programs that can be funded by community empowerment activities. Through the use of SWOT analysis and adult learning cycle method and experience, the community participation level in developing development planning and increasing knowledge in formulating the form of community participation planning in Lambuang Bukik village, Pauh sub-district, Padang city.

Keywords : participatory development, local value, adult learning cycle

PENDAHULUAN

Kelurahan Lambuang Bukik di Kecamatan Pauh merupakan salah satu desa binaan Universitas Andalas, wilayah ini terdiri dari 82% hutan lindung dan hutan rakyat, sedangkan

Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Lokal (Thamrin et al)

sisanya adalah arela perswahan, kebun dan ladang¹ Kecenderungan ini mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap pemilikan lahan, serta terdapat banyak tanah ulayat dan berbagai kearifan lokal untuk pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat asli setempat. Salah satu bentuk kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat adalah sikap proteksionis terhadap pemilikan lahan tersebut dari pendatang melalui bentuk kewargaan antara penduduk asli dengan pendatang, serta anjuran untuk “malakok” mencari mamak suku. Perbedaan perlakuan antara penduduk asl dengan pendatang merupakan sebuah mekanisme adat yang diciptakan agar hutan lindung dan hutan rakyat sebagai tanah ulayat bisa dipertahankan, agar bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat di nagari ini².

Gambaran adat istiadat di daerah ini dapat dijelaskan dari keberadaan dua KAN di Kecamatan Pauh, diantaranya KAN Pauh V dan KAN Limau Manis. Kedua KAN tersebut merupakan KAN berprestasi dalam pemilihan KAN tersebik di Sumatera Barat, KAN Limau Manis merupakan KAN berprestasi tahun 2015 dan KAN Pauh V adalah KAN berprestasi tahun 2016. Masing-masing KAN membawahi beberapa kelurahan di Kecamatan Pauh, dan masing-masing KAN terdiri dari beberpa suku, seperti KAN Limau Manis terdiri dari 5 suku diantaranya suku Tanjung, Jambak, Chaniago, Piliang, Melayu. Terdapat 30 orang ninik mamak yang mewakili masing-masing suku dalam KAN Limau Manis ini, ninik mamak ini berdomisili dalam masyarakat setempat serta membedakannya dari mamak lain di nagari Sumatera Barat yang banyak berada di daerah rantau serta tidak berfungsinya “*panungkek*” (wakil datuk) di nagari ini. Datuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik, seperti perencanaan pembangunan.

Kecenderungan ini mendorong lahirnya banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan Musrembang pembangunan, tetapi tidak seluruh aspirasi tersebut yang berhasil dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan pemerintah Kota Padang yang lebih memprioritaskan pada pembangunan prasarana fisik, seperti jalan raya³ Kelurahan ini merupakan hulu Batang Kuranji sebagai wilayah konservasi alam di Kota Padang. Sebagai daerah yang menjadi hulu Batang Kuranji serta ymemiliki banyak hutan lindung dan hutan rakyat, maka kelurahan Lambung Bukik berperan penting dalam pengendalian bencana alam di

¹ www.padang.go.id [Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya](#)

² Wawancara dengan Syarifuddin, Ketua KAN Limau Manis, Kecamatan Pauh, 10 November 2016.

³ Wawancara dengan Ketua KAN Limau Manis, 10 November 2016

Kota Padang, terutama sejak terjadinya banjir bandang pada tahun 2015. Banyak lahan di kelurahan ini tidak digarap serta ditumbuhi rumput, serta mendorong Pemerintah Kota Padang untuk melakukan kegiatan penanaman berbagai tanaman produktif, seperti manggis.

Karakteristik lingkungan alam yang terdiri dari banyak tumbuhan hutan lindung dan hutan rakyat tersebut mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat kelurahan Lambuang Bukik. Easton menjelaskan pengaruh tersebut dalam bentuk tuntutan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan kelurahan sebagai bentuk sistem politik masyarakat kelurahan ini, bentuk tuntutan dan dukungan ini diantaranya dipengaruhi oleh faktor yang terdiri dari lingkungan dalam masyarakat itu sendiri dan lingkungan luar masyarakat seperti faktor ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian, struktur sosial dan demografi (Easton, 1957). Perumusan kebijakan pembangunan di kelurahan Lambuang Bukik merupakan proses politik yang menampung tuntutan dan dukungan masyarakat sebagai lingkungan pemerintahan kelurahan, tuntutan dan dukungan tersebut disalurkan melalui proses perumusan, implementasi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan melalui forum Musrenbang Kelurahan (RPJMKel) yang disusun untuk 5 tahun perencanaan. RPJMKel ini dilakukan pada bulan Januari, serta dihadiri berbagai kelompok kepentingan, seperti wakil pemuka masyarakat, ketua RW atau jorong. Forum ini merupakan media dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk membahas pembangunan yang baik yang dandani secara swadaya oleh masyarakat maupun melalui pos bantuan daerah, program rencana kerja (renja) SKPD kelurahan maupun didanai oleh bantuan SKPD lain yang terkait.

Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu: 1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan; 2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat; 3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kota); 4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD provinsi; 5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan

memaparkan persoalan yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.⁴

Tidak seluruh usulan pembangunan yang disampaikan oleh kelompok kepentingan atau masyarakat tersebut yang bisa direalisasikan dalam bentuk rencana pembangunan, dibutuhkan penyesuaian usulan tersebut dengan rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah melalui SKPD kelurahan atau SKPD lain yang terkait dengan penganggaran kegiatan usulan tersebut. Beberapa usulan pembangunan yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah di kelurahan ini, diantaranya adalah pembangunan jalan lingkar Universitas Andalas yang memudahkan akses masyarakat setempat untuk pergi menuju kampus Unand, pembangunan jalan ke Ssungkai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut, serta pemasaran hasil kegiatan ekonomi kecil (UKM) masyarakat, seperti kue. Beberapa usulan tersebut tidak hanya disampaikan masyarakat melalui forum Musrembang kelurahan, tetapi juga melalui dialog dengan calon wakil rakyat setiap pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif baik pada tingkat II Kota Padang maupun DPRD Tingkat I Sumatera Barat yang berkunjung ke kelurahan ini.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat ke kelurahan ini ditemukan bahwa persoalan adanya kesenjangan antara usulan (tuntutan) pembangunan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dihasilkan disebabkan oleh lemahnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme perumusan kebijakan pembangunan sebagai sebuah proses politik, serta lemahnya struktur politik yang ada dalam menyalurkan usulan (tuntutan) kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan analisa kebijakan publik yang terkait dengan perumusan kebijakan pembangunan melalui dialog pemerintah dengan masyarakat melalui forum Musrembang ini, maka tujuan pengabdian masyarakat yang dilakukan tim pengabdian masyarakat dari Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas ini adalah Peningkatan Nilai-Nilai Lokal dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Lambuang Bukik, Nagari Limau Manis, Kota Padang.

Secara umum kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan di tingkat kelurahan untuk merumuskan berbagai gagasan pembangunan yang terkait satu sama lain antara pembangunan sektor ekonomi dengan sektor sosial dan budaya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) yang berlangsung pada tingkat

⁴ Info Anggaran, diakses Sabtu, 03 Februari 2018, jam 0.7.00
Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Lokal (Thamrin *et al*)

kelurahan dalam forum Badan Musyawarah (BAMUS) kelurahan serta melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Ketua RW, Pengurus KAN, Bundo Kandung, Tokoh Pemuda serta lurah. Target luaran yang ingin dicapai pemberian materi pelatihan perencanaan pembangunan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) untuk para peserta pelatihan, Sehingga akan ada tindak lanjut yang positif antara lembaga atau pihak terkait dan juga lembaga Perguruan Tinggi dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) pada tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan yang interaktif dan dialogis, untuk menumbuhkan kesadaran dan memberikan pengetahuan perencanaan pembangunan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam forum BAMUS dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) agar mereka lebih memahami apa pengertian perencanaan dan pembangunan yang sebenarnya. Kenapa harus dilakukan perencanaan pembangunan ?. Hal yang terpenting dari tumbuh kembangnya partisipasi pembangunan adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan untuk memberikan masukan dan pengetahuan perencanaan pembangunan terhadap masyarakat Indonesia. Dalam hal ini sasarannya adalah pihak kelurahan sebagai elemen terpenting unit pemerintahan terendah di kota, Ketua RT/RW dan lembaga KAN sebagai penangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kelurahan menjadi target utama dalam pengembangan pengetahuan perencanaan pembangunan dan penyebaran nilai – nilai persamaan hak dan norma – norma perwakilan permusyawaratan sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Kearifan lokal (*lokal wisdom*) merupakan suatu gagasan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Puguh, 2010). Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang dijadikan pegangan hidup terus menerus, diperlukan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai budaya sebagai sebuah pengetahuan lokal yang sudah menyatu dalam kepercayaan, norma, dan budaya yang diekspresikan dalam tradisi, mitos. Istilah lain kearifan lokal (*lokal wisdom*) adalah pengetahuan lokal (*lokal knowledge*) dan kecerdasan lokal (*lokal genius*), lokal genius ini Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Lokal (Thamrin *et al*)

disebut sebagai identitas lokal (*lokal identity*) yang menyebabkan bangsa/masyarakat tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan dirinya sendiri (Gitosaputro, 2015;103).

Identitas lokal bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi sesuatu yang bersifat dinamis mengikuti tujuan politik. Pendapat ini dianut baik oleh pendukung maupun penentang pemekaran daerah, pemekaran daerah meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas struktur pemerintahan disebabkan ditinggalkannya identitas kultur lama. Hal ini menyebabkan identitas lokal dipengaruhi oleh faktor eksternal wacana dari luar, terutama dari aktor politik yang menggunakannya untuk tujuan kebijakan pembangunan (Terlow, 2016:938). Identitas lokal juga digunakan oleh pemerintahan sebagai strategi pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan sendiri adalah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Disamping itu, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminim mungkin. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi. Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas sebagai cara berfikir dalam menyelesaikan masalah dengan cara sistematis dan menyediakan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan dipengaruhi oleh karakter masyarakat dalam mengembangkan budaya ilmiah dalam menyelesaikan tugas, serta terkait erat dengan proses pengambilan keputusan (*decision making process*), sedangkan kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (*knowledge*), pengalaman (*experience*), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan. Friedman menjelaskan bahwa perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar, yakni bagaimana teknis pengetahuan

perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik, tujuan perencanaan adalah untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan Campbell dan Fainstein (1999:1) menjelaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis atau demokrasi mempengaruhi perencanaan Pembangunan Kota atau Daerah, perencanaan tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik masyarakat dalam daerah atau perkotaan tersebut.

Keputusan publik mempengaruhi kepentingan-kepentingan lokal. Ketika perencanaan dipengaruhi oleh sistem politik maka kekuasaan akan mempengaruhi bentuk perencanaan pembangunan, serta menyebabkan wilayah perencanaan akan kehilangan kemandirian rasionalitas. Implikasinya adalah perencanaan berjalan tidak efisien serta bersifat mendua antara tuntutan kepentingan dengan tuntutan rasionalitas perencanaan, pengaruh sistem politik dalam perencanaan ini akan mempengaruhi kualitas perencanaan itu sendiri dalam perencanaan tujuan (goal) dan obyektif (sasaran) perencanaan. Disamping itu, faktor keberadaan perencanaan dalam wilayah publik membutuhkan komitmen pemangku kepentingan (stakeholders) agar manfaat perencanaan dapat dirasakan. Ada persamaan bentuk dokumen deklarasi kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, seperti platform bersama gagasan kenegaraan sebagai titik temu (common platforms) semua elemen Bangsa, sistem pemilihan pemerintahan secara berkala, sekaligus motto negara kesatuan nasional yang diambil dari *E Pluribus Unum*, . Oleh karena itu, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meniru model demokrasi Amerika Serikat yang diterapkan di seluruh negara dunia, kemudian diikuti oleh Filipina, Taiwan, Korea Selatan (Muslim Mufti, 2016; 65).

Model demokrasi yang berfungsi di Amerika Serikat adalah sistem rekonsiliasi yang diuntungkan oleh pertukaran informasi dan pengetahuan bebas yang dibutuhkan di masyarakat yang melakukan modernisasi dan dilakukan oleh ilmuwan sosial, insinyur dan ilmuwan lainnya yang jumlahnya banyak dalam masyarakat. Sistem rekonsiliasi ini bekerja dalam demokrasi "libertarian-sekuler", seperti Amerika Serikat. (Chilcote, 2004; 382). Namun, implementasi sistem ini dalam bentuk sistem pemilihan langsung yang diprakarsai oleh perancang konstitusi di Indonesia pada awal kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan latar belakang pendidikan masyarakat yang lebih rendah dan keterbatasan infrastruktur pemerintah (Muslim Mufti, 2016: 53). Sistem pemilihan ini berfungsi untuk memperkuat legitimasi politik Presiden yang tidak sepenuhnya didukung oleh kekuatan politik di legislatif, tetapi dukungan

yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang diajukan oleh eksekutif ke lembaga legislatif.

Pengesahan kedua lembaga negara tersebut merupakan bentuk penerapan sistem pemerintahan yang demokratis dalam upaya legalisasi kekuatan politik yang tidak terwakili sepenuhnya dalam sistem pemerintahan terpilih. Dalam pelaksanaan demokrasi politik, asas kekuasaan mayoritas (*majoritarian rule*) disandingkan dengan kekuatan konsensus dan bentuk pengiriman kuasi sistem pemerintahan Presiden atau semi presedensial yang berkembang di Indonesia di era reformasi. Model perencanaan pembangunan di Indonesia diturunkan dari beberapa prinsip lainnya yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, diantaranya adalah : (1) berkonsultasi dengan beberapa pandangan sebelum membuat proposal legislatif, membahas RUU sebelum pemungutan suara; (2) prosedur untuk menempatkan keputusan pilihan ganda (*multiple choice*), agar masyarakat bisa memberikan pandangan dalam keputusan akhir yang menguntungkan setiap orang; (3) menempatkan keputusan politik sebagai sebuah proses berkelanjutan, susunan kaum mayoritas dan minoritas berubah sesuai dengan persoalan yang dibahas ; (4) mengambil persoalan di luar ruang lingkup keputusan kaum mayoritas, caranya dengan cara mengajukan RUU HAM dan bergantung pada kaum minoritas.

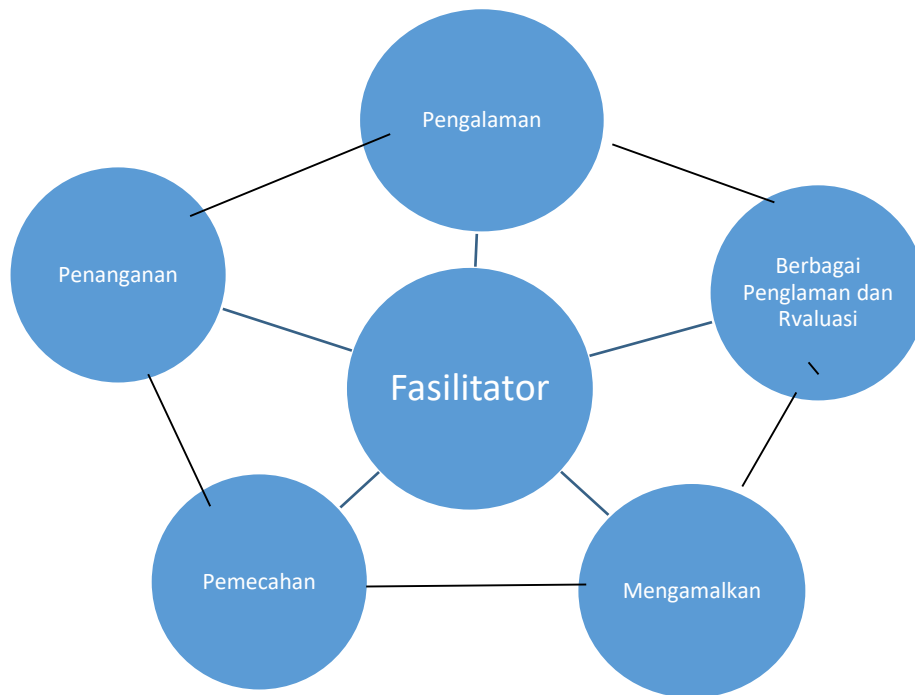
Penerapan model perencanaan pembangunan di Indonesia diatas bisa mengatasi persoalan adanya keterputusan (*missing link*) antara demokrasi perwakilan dalam demokrasi liberal yang memiliki ciri pemilihan pemimpin secara langsung, tetapi proses pengambilan keputusan diwakili oleh wakil rakyat di DPRD dengan demokrasi permusyawaratan (*deliberatif*) yang memiliki ciri pemilihan pemimpin tidak langsung, tetapi proses pengambilan keputusan dilakukan secara langsung oleh masyarakat seperti praktek demokrasi yang berkembang di desa (*nagari*) Indonesia. Dokumen perencanaan periode 1998-2000 merupakan bentuk perubahan mendasar dan strategis dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan dokumen perencanaan pembangunan menurut UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mencakup landasan hukum rencana pembangunan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. UU ini menjelaskan SPPN merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta melibatkan masyarakat. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun terpadu oleh lembaga/kementerian serta perencana pembangunan Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Lokal (Thamrin *et al*)

di tingkat daerah mencakup, diantaranya; (1) RPJP dengan periode 20 tahun; (2) RPJM dengan periode 5 tahun, (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang diselenggarakan unsur pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan masyarakat Schroeder (2008:26) menjelaskan perencanaan melibatkan 10 langkah yang harus dijalankan secara berurutan, langkah-langkah ini terbagi dalam 3 fase, diantaranya; (1) Analisa situasi; (2) Keputusan strtaegis; (3) Implementasi strtaegis.

Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam 10 langkah tersebut, diantaranya: (1) Apa yang seharusnya direncanakan, dan dengan tujuan strtaegis yang mana; (2) Bagaimana kita menilai situasi dimana akan dijalankan (Analisa dan Evaluasi Situasi); (3) Keputusan strtageis apa yang harus diambil, agar rencana tersebut sukses dijalankan dalam situasi yang ada ((perumusan sub-strategi); (4) Tujuan taktis manakah yang harus dicapai untuk menjalankan (Perumusan tujuan); (5) Bagaimana lingkungan internal dan eksternal mengenali atau mengidentifikasi kita (target image); (6) kelompok mana sajakah (internal atau eksternal) yang penting bagi pencapaian tujuan taktis, dan kelompok mana sajakah yang menaruh minat khusus untuk kita-berdasdarkan citra yang kita inginkan ? (kelompok target); (7) Faktor citra manakah yang penting bagi kelompok target tertentu (peran kelompok target); (8) Bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita bersama kelompok; target kita ? (instrumen kunci); (9) bagaimana kita menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan taktis ? (Rencana jadwal dan operasional); (10) Instrumen mana yang kita gunakan untuk mengendalikan implementasi strtaegi dan untuk mendata perubahan-perubahan data lingkungan sehingga strtaegi dapat disesuaikan? (pengendalian strategi).

METODE

Metode penyusunan Perencanaan Strategi Pembangunan Nagari ini menggunakan analisa SWOT, analisa SWOT ini berangkat dari analisa situasi lingkungan yang diterjemahkan dalam bentuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisa tersebut akan ditemukan strategi penggunaan kekuatan yang tersedia untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada masyarakat nagari Limau Manis, serta peluang-peluang yang tersedia untuk mengembangkan kekuatan dan mengatasi ancaman yang mungkin akan terjadi. Di samping menggunakan analisa SWOT, metode pelatihan penyusunan rencana strategi pembangunan nagari ini dilakukan dengan langkah-langkah mengikuti Siklus Pembelajaran Berdasarkan Pengalaman. Prinsip-prinsip belajar orang dewasa meliputi:



Gambar 1: Daur Belajar Orang Dewasa atau Daur Belajar Berdasarkan Pengalaman

Mitra berbuat, bertindak, berlaku, berdasarkan pada pengalaman yang telah dimiliki. Pengalaman mitra selama menjalankan fungsi-fungsi kelurahan, dalam proses menjalankan program pembangunan dipertukarkan dengan peserta lainnya yang juga memiliki pengalaman serupa. Mitra saling menggali penilaian dari peserta lain melalui diskusi, mengevaluasi pengalaman-pengalaman tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam proses ini mitra kemudian secara bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip rancangan naskah akademik dan diterapkan sebagai pengalaman baru. Proses ini menuntut adanya keterlibatan secara langsung dan aktif dari seluruh mitra. Mitra diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan perasaan dan hasil pemikirannya tanpa ada rasa tertekan. Pengusul program sebagai fasilitator akan berupaya menciptakan kondisi yang nyaman bagi mitra untuk belajar bersama, tanpa ada rasa malu, memegang prinsip kesetaraan tanpa ada yang merasa lebih dominan dan lebih tahu. Pengusul program juga berupaya mendorong diskusi dan untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mitra. Selain itu pengusul juga dapat memberikan ide- ide dari sudut pandang yang berbeda. Pengusul sebagai fasilitator akan berupaya membangun antusiasme mitra untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri.

Teknik pengumpulan data untuk dijadikan dasar analisis yang digunakan meliputi: 1. Studi Literatur dan Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis. 2. Focus group discussion(FGD) Teknik FGD digunakan untuk mendapatkan pandangan, pemikiran, pengalaman dari para praktisi pemerintah daerah. Peserta yang dilibatkan dalam FGD antara lain: para pengambil kebijakan, seperti Lurah, Ketua Bamus, fasilitator (pendamping) pembangunan kelurahan, serta wakil Bundo Kandung, Pemuda, cerdik pandai, alim ulama yang terlibat sebagai anggota dalam perumusan kebijakan pembangunan nagari dalam Bamus.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: a) Penghitungan dengan menggunakan metode dalam PP No. 41 Tahun 2007, yang mencakup indikator-indikator sebagai berikut: a. Luas Wilayah b. Jumlah penduduk c. Jumlah APBD d. Kriteria Perumpunan b) Analisis kebutuhan Nagari Limau Manis, dengan mengacu pada aspek-aspek sebagai berikut: a. Visi dan Misi Nagari Limau Manis b. Peningkatan Pelayanan Publik c. Reformasi Birokrasi pemerintahan nagari Analisis *cost and benefit* sebagai dasar dalam menentukan pembentukan, penghapusan atau penggabungan kelembagaan perangkat daerah. Keseluruhan hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi sebagai dasar dalam membentuk model penataan kelembagaan perangkat daerah serta rencana strategi pembangunan Nagari Limau Manis yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Nagari Limau Manis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan acara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Tim datang ketempat acara kurang lebih pukul 08.30 WIB. Saat tim datang ke lokasi acara, peserta acara yang berasal dari warga kelurahan Lambung Bukit sudah lebih dahulu datang dan mengisi tempat acara. Dari gambaran yang terlihat menunjukkan bahwa warga kelurahan Lambung Bukit cukup senang didatangi oleh tim pengabdian masyarakat berbasis program studi dari program studi Ilmu Politik. Banyak masukan yang diperoleh dari warga yang datang untuk program studi pada umumnya dan untuk Universitas Andalas khususnya. Dari masyarakat yang hadir, hampir sebagian besar yang berpartisipasi di forum, baik peserta perempuan maupun peserta laki-laki. Setelah sesi acara pertama, rangkaian acara Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Lokal (Thamrin *et al*)

selanjutnya adalah sesi kedua. Sesi kedua bertemakan tentang Penguatan Nilai lokal dalam pembangunan partisipatif. Didalam sesi ini, difokuskan untuk menggali tentang nilai nilai lokal yang sudah tertanam ditengah masyarakat kelurahan Lambung Bukit.

Dapat dikatakan bahwa terdapat komunikasi dua arah antara tim pengabdian dengan warga yang menjadi peserta acara. Disatu sisi mereka memperoleh informasi terkait dengan tema acara pengabdian sedangkan disisi lain mereka juga bisa mencurahkan keluh kesahnya kepada tim pengabdian. Acara diisi oleh dua sesi dengan tim pengisi acara yang juga berbeda. Dan acara selesai kurang lebih jam 13.00 WIB dengan ditutup foto bersama antara tim pengabdian dengan semua peserta acara. Luaran: Peningkatan Nilai-Nilai Lokal Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kelurahan Lambung Bukit Peningkatan nilai nilai lokal dalam perencanaan pembangunan partisipatif di kelurahan Lambung Bukit merupakan tema pengabdian yang diangkat oleh tim program studi Ilmu Politik Universitas Andalas. Alasan pengambilan tema ini adalah tidak lain untuk lebih melatih warga kelurahan Lambung Bukit agar bisa memanfaatkan nilai nilai lokal yang sudah tertanam kuat di tengah masyarakat disetiap proses perencanaan pembangunan partisipatif. Tujuan akhir tidak lain adalah agar bisa melahirkan sebuah program pembangunan yang mengikutsertakan sebagian besar warga dan juga nantinya bagus untuk kebaikan warga di kelurahan tersebut.

Menurut salah satu tokoh masyarakat bahwa banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi warga disetiap perumusan perencanaan pembangunan. Terutama mereka terkendala setiap berhubungan dengan para elit. Salah satu warga menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki satupun pegangan elit untuk bisa melancarkan urusan mereka ditingkat yang lebih tinggi. Bahkan dari pernyataan warga itu sendiri bahwa wakil rakyat yang sebelumnya dipilih justru melupakan mereka tepat setelah dia dinyatakan lulus dalam pencalonan. Mereka mengibaratkan seperti kacang lupa pada kulitnya. Adapun gambaran tahapan pembuatan perencanaan pembangunan yaitu berawal dari pengumpulan rencana dari tingkat RT kemudian lanjut ke tingkat RW kemudian diskusi dengan lurah, kemudian cari penyelesaiannya melalui Musrenbang. Didalam sesi ini diperoleh informasi tentang konsep pembuatan musrenbang nagari yaitu system pembangunan di kelurahan Lambung Bukik dilakukan secara bergiliran. Diluar program yang sudah direncanakan, tanpa disangka ternyata kegiatan ini juga diselingi oleh sesi curhatan hati warga Kelurahan Lambung Bukit.

Terdapat beberapa keluhan yang ingin mereka minta bantuan kepada tim Ilmu Politik untuk disampaikan kepada pihak Universitas Andalas. Terdapat beberapa keluhan yang disampaikan yaitu pertama mereka menanyakan tentang kelanjutan acara dengan pihak Unand, tentang program selingkoar kampus. Tidak hanya itu tapi juga ada keluhan dari perwakilan masyarakat Lambung Bukit terkait dengan akses jalan. Menurutnya terdapat kesukaran untuk memperoleh akses jalan dari kelurahan Lambung Bukit ke Unand masih kritis sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Keluhan lain adalah tentang bangunan belajar anak anak lambung Bukit. Dan masih banyak lagi keluhan keluhan yang disampaikan oleh peserta acara. Pada kenyataannya bahwa ini bukanlah hal pertama yang dilakukan oleh peserta. Sejak otonomi daerah masyarakat sudah mulai diikutsertakan dalam melaksanakan program program pembangunan.

Namun hampir 20 tahun dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, ada yang bilang bahwa kesejahteraan masih tetap belum terwujud. Kemajuan yang diharapkan juga jauh dari harapan. Salah satunya masalah bahwa tidak semua yang diajukan yang dikabulkan oleh pemerintah, masalah kedua yaitu banyak yang disampaikan oleh beberapa stakeholder yang tidak nyata. Dalam penyampaian, terdapat beberapa gambaran pernyataan dari peserta yang hadir terkait dengan permasalahan dalam pembangunan partisipatif yaitu: 1. Kurangnya dana yang dikucurkan 2. Kondisi pendidikan yang masih belum representative 3. Banyak program yang diusulkan yang tidak sukses /hilang ditengah jalan 4. Masih belum representative infrastruktur dasar (jalan, jembatan) 5. Hasil musrenbang tidak sesuai harapan 6. Bermasalah dengan pemasaran hasil ekonomi kerakyatan rakyat 7. Masalah narkoba dan pergaulan/penyakit remaja

Salah satu yang disampaikan oleh warga untuk dibisa dibantu oleh Universitas Andalas adalah terkait dengan kuota yang dikhususkan kepada anak anak warga kelurahan Lambung Bukit. Mereka berharap agar dipermudah peluang lulus untuk anak anak saat mencoba mendaftar ke Universitas Andalas. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki keinginan agar bisa mempermudah pemasaran produk buatan rumah tangga ke lingkungan kampus Unand karena banyak hasil buatan rumah tangga warga kelurahan Lambung Bukit yang tidak ditemukan tempat pemasarannya dan masih banyak lagi keinginan yang disampaikan oleh warga yang datang kepada tim pengabdian. Menurut salah satu RT kelurahan Lambung Bukit menginginkan agar pihak Universitas Andalas bersedia memfasilitasi atau menjadi penengah atas permasalahan warga. Menurut ketua RT lagi bahwa masyarakat Lambung Bukit sering

terkendala dengan pakar atas permasalahan mereka, masyarakat harus bisa segera mencari strategi pemasaran produk masyarakat. Warga masyarakat harus ikut berperan aktif dalam proses perencanaan karena dengan keterlibatan yang mereka lakukan secara tidak langsung akan membantu meringankan beban para pihak yang berwenang

Strategi pengembangan UMKM adalah melalui jalur Dharmawanitas Andalas, kalau ada ibu-ibu PKK yang menjadi ketua penguatan UMKM, maka bisa dihubungi ibu Dharmawanita Universitas Andalas untuk mendatangi dan membuat sebuah brosur atau stempel untuk ajang promosi. Dalam penyampaian tim juga menyampaikan bahwa banyak solusi sebenarnya atas permasalahan masyarakat terkait dengan proses pembangunan partisipatif. Setelah sesi penggalian nilai-nilai lokal berdasarkan alasan tentang mengapa sangat susah bagi Universitas Andalas sebagai lingkungan paling dekat untuk membantu menciptakan pembangunan di kelurahan Lambung Bukit. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dana yang dimiliki oleh Universitas Andalas yang dananya tidak lain berasal dari APBN. Jembatan yang dari Limau Manis bertahun-tahun baru bisa diselesaikan dan itu pun juga butuh turun gubernur. Jadi perlu untuk warga Lambung Bukit memiliki perpanjangan tangan yaitu anggota dewan rakyat untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Lambung Bukit.

KESIMPULAN

Pembangunan kelurahan Lambung Bukit tidak hanya tanggung jawab lurah dan perangkatnya semata tapi merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Masyarakat tahu tentang segala sesuatu yang mereka butuhkan jadi sudah sewajarnya untuk mereka ikut bersama-sama merumuskan perencanaan pembangunan tersebut. Dibutuhkan keterlibatan nilai-nilai lokal disetiap upaya perumusan perencanaan kebijakan agar nantinya juga memberikan hasil yang lebih baik lagi, diantaranya adalah peningkatan nilai saling bekerja sama dan nilai musyawarah serta mufakat. Sebab tanpa adanya pemanfaatan nilai lokal, sedikit banyak tentu ada kekurangan didalam proses perencanaan kegiatan. Disamping itu, warga kelurahan Lambung Bukit pada kenyataannya membutuhkan perluasan jejaring kerja yang bisa diajak bekerjasama untuk perbaikan kelurahan termasuk dengan elite-elit politik ditingkat pembuat kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari laporan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi melalui Skema Riset Dasar Operasi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada tahun 2017 melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas. Ucapan terimakasih disampaikan ke Kementerian Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi melalui Universitas Andalas sebagai pihak yang terlibat dalam membantu pendanaan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shukri Mohd. Nain, Rosman Md. Yusoff, 2003, *Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan*, Universiti Teknologi Malaysia, Sekudai, Malaysia
- Agusta, Ivanovich, Tetiani, Ani & Fujiartanto, 2014,. "Teori dan Kebijakan Desa Untuk Indonesia". Dalam Ivanovich Agusta & Fujiartanto (Eds.). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 13-32.
- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Antlov, Hans. 2003. "Village Government And Rural Development In Indonesia: The New Democratic Framework." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39(2): 193-214.
- Benda-Becmann, Franz von & Benda-Beckman, Keebet von. 2013. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonialisation to Desentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cheema, G. Shabir. 2005. *Building Democratic Institutions: Governance Reform In Developing Countries*. New York: Kumarian Press.
- Chilcote, Ronald H., 2004, *Teori Perbandingan Politik*, PT Rajawali Pers, Jakarta
- Corporaso, James A. And David P. Levine, 2008, *Teori Teori Ekonomi Politik*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Deliarnov, 2006, *Ekonomi Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Didik J. Rachbini, 2006, *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Didin S. Damanhuri, 2010, *Ekonomi Politik dan pembangunan, Teori, Kritik. Dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, PT Penerbit IPB Press, Bogor
- Gitosaputro, Sumaryo dan Kordiyana K. Ranga, (2015), *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Terjemahan. Jakarta: The Freedom Institute.
- Hari Sabarno. 2007. *Untaian pemikiran otonomi daerah: memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hasbi, Muhammad. 1971. “*Perkembangan Lembaga Kerapatan Adat di Nagari-Nagari Minangkabau: Uraian Tentang Perkembangan Kerapatan Adat Tradisionil Ke Arah Perkembangan Kerapatan Demokratis Nagari.*” Skripsi Doktorandus. Institut Ilmu Pemerintahan, Malang.
- Henley, David & Davidson Jamie. S. 2007. “Radical Conservatism—the Protean Politics of Adat” dalam Jamie S Davidson & David Henley (Eds.). *The Revival of Tradition in Indonesia Politics: the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London: Routledge, hlm. 1-49.
- Huntington, Samuel P, 1983, *Tertib Politik Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, CV Rajawali Press, Jakarta
- I. Wibowo, Francis Wahono, 2003, *Neoliberalisme*, CinderalasPustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta,
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Terjemahan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Modern Dan Otoritas Tradisional Minangkabau (Nagari Dan Desa di Minangkabau)*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- Muslim Mufti, Didah Durrotun Naafisah,, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, , Penerbit Pustaka Setia, Bandung
- Schroeder, Peter, 2008, *Strategi Politik*, Friedrich-Neumann-Stiftung fur die Freiheit, Jakarta
- Syafrizal, 2009, *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, Baduose Media, Padang
- Tamrin, Asrinaldi dan Indah Adi Putri. 2013. *Model Transfer Dana Perimbangan Dan Pemerataan Kemampuan Fiskal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Padang: LPPM Universitas Andalas.
- Tamrin, Yanita, Yoserizal, 2016, *Pengembangan Model Nagari Adat Di Bawah Rezim UU Desa Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat*, laporan penelitian Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT), Universitas Andalas, Padang
- Terlow, Kees, 2017, “Territorial Changes and Changing Identities: how spatial identities are used in the up-scaling ofv local government in the Netherlands”, *Local Government Studies*, Vol. 42, No. 6, 938-957
- Warjo, 2016, *Politik Pembangunan, Pardoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Yoserizal & Asrinaldi. 2013. “Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok Di Sumatera Barat Dan Desa ponjong di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Sosiohumaniora*, 15(2): 178-193.
- Yoserizal & Asrinaldi, 2011. “Praktik Pemerintahan Terendah Dalam Pembangunan dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat”. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 3(2):85-103.
- Yoserizal, Asrinaldi & Rahmadani Yusran. 2005. “Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Lokal (Thamrin et al)

Sumatera Barat”,. *Laporan Penelitian Balitbang Provinsi Sumbar*. Padang: Balitbang Provinsi Sumatera Barat,

Zainuddin, Musyair. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Ombak., Yogyakarta: